

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek pro-THA Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan tentang apotek, perundang-undangan farmasi, manajemen pengelolaan apotek, serta pengetahuan tentang obat dan penggunaannya.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan dan ketrampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi dunia kerja dan mampu bekerja secara professional.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan memiliki kemampuan kerjasama yang baik dengan semua karyawan di apotek dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien dalam melakukan KIE, sehingga informasi yang disampaikan tepat dan benar.
4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga mampu melakukan kegiatan di apotek dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia*, volume 51, 2017/2018. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P. and Lance, L.L. 2007, *Drug Information Handbook*, 17th ed., Lexi-Comp Inc., Ohio.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 tentang Obat Wajib Apotek*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 tentang Wajib Daftar Obat Jadi*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2003, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2012, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tentang Apotek*.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- Presiden Republik Indonesia. 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*.
- Presiden Republik Indonesia. 2013, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Presiden Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan*.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*. Edisi III, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C. 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press, London.